



Communist Movement on the Social Revolution at Pekalongan Residence in 1945

Muzaki Ulyya Hakim

Prodi Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga
muzakiullya676@gmail.com

Ahmad Faidi

Prodi Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga
ahmadfaidi86@uinsalatiga.ac.id

Submitted: 24 November 2023	Revision Required: 30 November 2023	Published: 30 Desember 2023
--------------------------------	--	--------------------------------

Abstract

The social revolution in the Pekalongan Residency was an uprising that emerged as a response to the proclamation of Indonesia's independence. This revolution was marked by tension between revolutionary groups and pangreh praja officials, who were seen as representatives of the colonial system. In this context, the revolution was understood as an effort to transform the social order towards a more democratic system, with its key figures coming from Islamic, socialist, and communist circles. This research uses historical research methods, namely: Heuristic stages of collecting sources, verification or criticism of sources, Interpretation or interpretation, and historiography or historical writing. Then the use of data related to the theme raised is primary source data and secondary sources and the same literature. Data collection by researchers is carried out by literature studies and archival document studies. The study's findings show that the social revolution in the Pekalongan Residency was triggered by several main factors, namely the suffering and oppression experienced by the people during Dutch and Japanese colonialism, corruption and misconduct

among pangreh praja officials (Regents, Wedana, District Chiefs, and Village Heads), and the silence of the pangreh praja regarding the proclamation news. This revolutionary event involved conflict, violence, the forced overthrow of pangreh praja officials, and the takeover of the Pekalongan Residency government by revolutionary groups. During these events, radical or communist groups had strong influence, acting as the main drivers of uprisings in various areas and determining the direction of the social revolution within the Pekalongan Residency.

Keywords: *influence, communist movement, social revolution, pekalongan residency.*

Abstrak

Revolusi sosial di Karesidenan Pekalongan adalah suatu pergolakan rakyat yang muncul sebagai respons terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Revolusi ini ditandai oleh ketegangan antara kelompok revolusioner dan pejabat pangreh praja, yang dianggap masih mewakili sistem kolonial. Dalam konteks ini, revolusi dimaknai sebagai upaya untuk mengubah tatanan sosial menuju sistem yang lebih demokratis, dengan tokoh-tokohnya berasal dari kalangan Islam, sosialis, dan komunis.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yaitu: Heuristik atau tahapan pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sumber, Interpretasi atau penafsiran, dan historiografi atau penulisan sejarah. Penggunaan data-data yang berkaitan dengan tema yang diangkat adalah data sumber primer dan sumber sekunder yang literturnya sama. Pengumpulan data oleh peneliti dilakukan dengan studi kepustakaan serta studi dokumen arsip.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa revolusi sosial di Karesidenan Pekalongan dipicu oleh beberapa faktor utama, yaitu penderitaan dan penindasan rakyat selama masa penjajahan Belanda dan Jepang, penyimpangan dan tindak korupsi pangreh praja (Bupati, Wedana, Camat, dan Lurah atau Kepala Desa), dan bungkamnya pangreh praja terhadap berita proklamasi. Peristiwa revolusi ini melibatkan konflik, kekerasan, serta penggulingan paksa terhadap pangreh praja, dan pengambilalihan pemerintah Karesidenan Pekalongan oleh kaum revolusioner. Selama peristiwa ini berlangsung, kelompok radikal atau komunis mempunyai pengaruh yang kuat. Mereka menjadi penggerak utama aksi-aksi pergolakan di berbagai daerah dan menentukan arah revolusi sosial di wilayah Karesidenan Pekalongan.

Kata Kunci: *pengaruh, gerakan komunis, revolusi sosial, dan karesidenan pekalongan.*

PENDAHULUAN

Munculnya kelompok komunis di Indonesia dimulai ketika Neevliet, seorang tokoh dari Belanda, tiba di Nusantara pada tahun 1913. Awal kedatangannya, ia mendirikan *Indische Social-Democratische Vereniging* (ISDV), sebuah partai kiri yang menjadi partai komunis pertama di Asia. Pada tahun 1920, ISDV kemudian mengubah namanya menjadi Perserikatan Komunis di Hindia Belanda dan kemudian pada tahun 1924 menjadi Partai Komunis Indonesia. (Mayjen Samsudin, 2005: 7)

Setelah PKI diresmikan pada tahun 1924, PKI menjadi salah satu kekuatan politik yang signifikan di Indonesia. Mereka mengklaim tujuan-tujuan gerakannya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dan mendukung kemerdekaan Indonesia dari jajahan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada periode ini, PKI mulai mengembangkan pengaruh ide dan gagasan politik mereka di seluruh kepulauan Indonesia. Di samping itu, pergerakan PKI pada periode ini menjadi tonggak awal sebuah gerakan sosial yang mendorong masyarakat kelas bawah untuk melakukan gerakan pembebasan dan melakukan aksi perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Gerakan ini tersebar luas dan dipimpin oleh tokoh-tokoh kelompok komunis yang berhasil memobilisasi masyarakat untuk bergerak secara bersama dan menuntut hak-hak mereka. (Hatama 2022: 67).

Pasca proklamasi, gerakan semacam ini kemudian muncul kembali, diinisiasi oleh kelompok perjuangan kemerdekaan yang merupakan mantan anggota gerakan PKI tahun 1926 yang pernah diasingkan ke Digul. Gerakan ini terjadi di Karesidenan Pekalongan, mencakup daerah-daerah seperti Brebes, Tegal, dan Pemalang. Peristiwa ini berlangsung antara Oktober hingga Desember tahun 1945 di wilayah Karesidenan Pekalongan. Selama peristiwa ini berlangsung, seluruh elite birokrat, termasuk bupati, camat, dan sebagian besar kepala desa digantikan oleh pemerintahan baru yang terdiri dari aliran-aliran Islam, sosialis, dan komunis. Di sini, revolusi sosial

diinterpretasikan sebagai gerakan untuk mengubah struktur masyarakat kolonial atau *foedal* menjadi sebuah tatanan masyarakat yang lebih demokratis. Peristiwa ini merupakan peristiwa lokal yang menjadi bagian dari revolusi di Indonesia yang memiliki karakteristik tersendiri. (Lucas, 1989: 1-2).

Lenggaong menjadi salah satu tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini. Mereka melakukan penggulingan pejabat daerah dan mengangkat orang-orang baru yang dipilih berdasarkan penilaian mereka sendiri, yang dianggap memiliki kualitas untuk memenuhi harapan masyarakat. Tindakan ini juga meliputi penangkapan pejabat daerah, perampokan dan pengambilan harta mereka, serta serangan terhadap beberapa pabrik dan pembunuhan terhadap orang-orang keturunan Eropa. (Aman, 2015, 32). Di samping itu, hadirnya K. Midjaya, seorang tokoh pergerakan berhaluan komunis, berhasil memanfaatkan situasi di Karesidenan Pekalongan dan mulai menanamkan pengaruhnya dengan membentuk badan perjuangan Tiga Daerah. Badan ini menyatukan berbagai lapisan kaum perjuangan di Brebes, Tegal, dan Pemalang dengan tujuan memperjuangkan hak-hak rakyat dan mendirikan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, terutama di wilayah Karesidenan Pekalongan. Peristiwa ini menjadi bagian penting dari gejolak revolusi pada masa itu. Pemikiran komunis memiliki pengaruh besar dalam revolusi ini, dengan tokoh-tokoh seperti K. Midjaya memainkan peran sentral dalam memobilisasi massa untuk melakukan gerakan besar-besaran.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana pengaruh kelompok komunis dalam terjadinya peristiwa revolusi sosial di Karesidenan Pekalongan, lalu apa yang melatarbelakangi terjadi revolusi tersebut, serta bagaimana jalannya revolusi sosial di Karesidenan Pekalongan tahun 1945.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah menurut Gottschalk adalah proses kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Gottschalk menjelaskan metode sejarah sebagai proses memeriksa dan menganalisis bukti-bukti sejarah untuk mendapatkan informasi yang autentik dan dapat diandalkan serta

berusaha mencermati data agar menjadi narasi sejarah yang dapat dipercaya. Sedangkan menurut Abdurrahman metode sejarah dalam pengertian umumnya adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historis.(Abdurrahman, 2007: 53). Kuntowijoyo mengemukakan pandangannya tentang metode sejarah yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi.(Kuntowijoyo, 1955: 18).

Peneliti memilih topik penelitian yang berjudul “Pengaruh Gerakan Komunis Terhadap Revolusi Sosial di Karesidenan Pekalongan Tahun 1945”. Dalam pengumpulan sumber primer dan sekunder, peneliti menggunakan sumber-sumber penunjang berupa buku, internet, jurnal dan literatur yang masih berkaitan dengan judul penelitian dan sezaman dengan tahun kejadian. Kemudian bukti penulisan dilakukan dengan berkunjung di Museum Mandala Bhakti Kota Semarang untuk menacari sumber yang valid. Selain itu, peneliti juga mencari beberapa dokumen online dengan mengunjungi beberapa website, seperti Anton Lucas Collection, koran lama online, dan delpher. Pada tahap verifikasi, peneliti mengambil kesimpulan dari sumber dokumen/arsip yang diperoleh dengan mempertimbangkan benar adanya sumber dan memiliki relevansi dengan sumber sekunder yang diperoleh. Setelahnya, peneliti melakukan tahap interpretasi yang bertujuan dalam menginterpretasikan fakta peristiwa yang terjadi dengan kesesuaian tema yang di angkat melalui sumber hasil dokumen arsip ataupun sumber sekunder sebagai pendukung penelitian. Pada tahapan terakhir, yakni historiografi, peneliti menyajikan tulisan secara kronologis dan sistematis melalui data yang sudah dikritik dan interpretasikan secara objektif.

Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial, seperti yang di ungkapkan oleh Sartono Kartodirdjo bahwa adanya gerakan sosial sebagai upaya perjuangan yang dilakukan oleh kelompok sosial tertentu untuk melawan eksploitasi ekonomi, sosial, politik, agama, dan budaya yang dilakukan oleh kelompok penindas, baik itu penguasa atau negara.(Kartodirdjo, 1993: 20). Peneliti juga menggunakan teori pengaruh sosial seperti yang dikemukakan oleh Helbert Kelman bahwa pengaruh sosial sering kali timbul dari tindakan, perintah, atau

permintaan tertentu yang dapat mengubah sikap dan perilaku kelompok tertentu sebagai respons terhadap apa yang dianggap dapat diterima atau diharapkan oleh kelompok tersebut. (Kelman, 1958: 51)

PEMBAHASAN

Nasib Masyarakat Karesidenan Pekalongan Periode Belanda Hingga Jepang

Pelaksanaan sistem tanam paksa (*Culturstelsel*) oleh Belanda yang dimulai pada tahun 1830 memberikan banyak keuntungan bagi pihak Belanda, sementara rakyat menjadi semakin menderita. Dampaknya sangat merusak, menyebabkan kemiskinan yang meluas dan ketidakstabilan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah Belanda memaksakan aturan-aturan yang menyulitkan rakyat, sehingga mereka terpaksa harus mengorbankan waktu, tenaga, dan perhatiannya untuk tanaman ekspor yang berkualitas. Akibatnya, mereka tidak dapat dengan baik mengelola sawah mereka sendiri, sementara bagi mereka yang tidak memiliki tanah, terpaksa harus bekerja melebihi kemampuan mereka. Lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian pangan diberikan untuk tanaman komoditas ekspor. Jika gagal panen pada tanaman wajib, rakyat tetap bertanggung jawab dan bahkan harus membayar pajak atas lahan yang mereka sisihkan untuk tanaman tersebut. Namun, jika hasil panen melebihi jumlah pajak yang harus dibayar, rakyat tidak mendapatkan kembali kelebihan hasil yang mereka serahkan. Dengan demikian, sistem tanam paksa tidak hanya memaksakan beban yang berat pada rakyat, tetapi juga mengarah pada ketidakadilan ekonomi yang mendalam dan ketidakstabilan sosial yang parah. (Aman, 2019: 24)

Sementara penerapan politik etis pada tahun 1901 nyatanya tidak membawa manfaat bagi rakyat. Justru hal tersebut semakin memperburuk kondisi ekonomi rakyat. Hal ini disebabkan oleh peran kepala desa dan pangreh praja yang sering bertindak semena-mena dalam melaksanakan tugas mereka. Di Karesidenan Pekalongan, sumber penghasilan petani dari tanah milik desa diambil alih oleh kepala desa sebagai gaji. Kepala desa kemudian menyewakan tanah tersebut kepada pabrik gula secara tidak sah, sehingga tanah yang awalnya menjadi sumber penghasilan rakyat kini menjadi alat untuk

memperkaya diri kepala desa. Akibatnya, kesenjangan sosial semakin melebar, dengan orang kaya menjadi lebih kaya dan orang miskin semakin miskin. Bersamaan dengan meningkatnya kemiskinan, kehadiran pabrik gula semakin mempersempit kondisi para petani lokal. Rakyat dipaksa untuk menyewakan lahan sawah mereka beserta tenaga kerja kepada industri gula dengan harga yang sangat rendah. Sebagai akibatnya, pada pertengahan tahun 1920-an di Karesidenan Pekalongan, para petani padi jarang atau bahkan tidak menanam sawah mereka dengan padi sama sekali, karena dominasi besar-besaran pabrik gula di wilayah tersebut telah menyempitkan ruang gerak mereka.(Lucas, 1989: 17)

Pada masa pemerintahan Jepang, kebijakan Swasembada yang diterapkan oleh Jepang secara bertahap menyulitkan rakyat Karesidenan Pekalongan. Mereka menuntut hasil panen padi dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan beras militer Jepang. Para petani di daerah tersebut juga terkena wajib tanam, di mana mereka diharuskan menanam tanaman seperti rami atau rosela ubi, iles-iles, dan jarak secara *massal* di seluruh wilayah Jawa Tengah untuk kepentingan perang. Mereka harus merawat, mengelola, dan memanen tanaman-tanaman tersebut sendiri, yang keseluruhannya menjadi beban bagi rakyat. Selama masa sulit ini, rakyat terpaksa menggantikan beras dengan makanan alternatif seperti bubur singkong, umbi-umbian yang harus diolah secara khusus untuk menghilangkan racunnya, serta bonggol pisang dan daun kelapa. Tidak mengherankan jika pada masa itu, rakyat terpaksa mengonsumsi bekicot dan menggunakan pakaian dari kain karung karena makanan dan pakaian yang cukup tidak lagi tersedia.(Wiyono dkk, 1991: 22-23)

Nasib rakyat juga diperburuk oleh kepala desa dan pangreh praja yang melakukan tindakan penyimpangan dan korupsi selama masa penjajahan Belanda hingga Jepang. Para kepala desa kerap melakukan penyelewengan kadar pajak dengan menaikkan jumlah pajak yang telah ditetapkan sehingga membuat para petani sangat dirugikan. Penugasan yang diterima kepala desa menjadi pengumpul padi menjadi pintu luang untuk mereka dalam memperpanjang tindak korupsi mereka. Terdapat ada empat cara korupsi yang dilakukan oleh kepala desa dalam proses penyerahan padi oleh petani. Pertama,

kepala desa menilai setoran padi kurang dari berat sebenarnya dengan alasan bahwa padi terlalu basah, yang mengakibatkan pengurangan rata-rata 3 persen per kuintal dari berat sebenarnya. Kedua, banyak gabah yang jatuh ke tanah saat ditimbang di halaman kelurahan, sehingga sekitar 1 kilogram dari setiap kuintal gabah jatuh ke tangan kepala desa. Ketiga, kepala desa menilai panen dari ladang bengkoknya sangat rendah, sementara sebagian besar padi dari setoran tersebut digantikan dengan padi dari penduduk, sementara padi dari ladangnya sendiri dijual di pasar gelap. Keempat, dengan menggunakan dacin (timbangan) yang hanya mampu menimbang maksimum 60 kg, sehingga harus menimbang dua kali untuk setiap kuintal. Kecurangan semacam ini memudahkan kepala desa untuk mencuri 1 - 2 kilogram padi setiap kali timbang dilakukan. (Lucas, 1989: 46)

Penyimpangan dan praktik korupsi yang dilakukan oleh pangreh praja nampaknya telah mengakar kuat. Mereka seringkali memanfaatkan posisi dan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi dan usaha memperkaya diri. Dengan adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh pangreh praja, banyak persediaan padi yang hilang, sehingga pemerintah Kolonial memperkenalkan sistem pukol rata yang mengharuskan penambahan jumlah setoran untuk mengganti padi yang telah hilang karena praktik korupsi tersebut. Bagi rakyat, korupsi pangreh praja menjadi salah satu penyebab utama ketidakpuasan dan kemarahan. Selain itu, sikap bungkamnya pangreh praja yang secara tegas menolak kebenaran berita proklamasi mewarnai situasi di masyarakat. Secara terang-terangan, para pangreh praja mengatakan bahwa proklamasi itu belum memiliki bentuk yang konkret, dan masih berupa ideologi saja. Mereka juga masih mengakui kekuasaan pemerintah Kolonial dan masih menaruh harapan besar kepada pemerintah tersebut. Akibatnya, pada bulan Agustus 1945, kebencian rakyat terhadap pangreh praja terbukti meledak, sebagai respons terhadap penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan sikap kontrarevolusi yang dilakukan oleh pangreh praja. (Alwijaya, 2023: 37)

Meletusnya Konflik Di Tiga Daerah

Setelah Indonesia merdeka dan proklamasi resmi dibacakan di Jakarta, kaum revolusioner di tiga kabupaten Karesidenan Pekalongan, yaitu Brebes, Tegal, dan pemalang, melakukan aksi kudeta dan penggulingan pejabat daerah sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap Kolonialisme. Para pejabat daerah dianggap orang-orang yang terikat dengan para penjajah dan dianggap sama, ditambah juga dengan tindakan-tindakan mereka yang telah banyak menyengsarakan rakyat akibat penyelewengan dan praktik-praktik korupsi. Sehingga para pejabat daerah sudah tidak layak untuk menduduki kursi pemerintah lagi dan wajib dibersihkan, karena mereka hanya akan mempersulit perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penggulingan ini terjadi dari Oktober hingga Desember 1945, di mana seluruh elite birokrat, termasuk residen, bupati, wedana, dan camat, serta sebagian besar kepala desa, digulingkan dan digantikan oleh pemerintahan baru yang terdiri dari aliran-aliran Islam, Sosialis, dan Komunis. (Aman, 2015: 30)

Dari awal Oktober hingga pertengahan Desember tahun 1945, terjadi gelombang gerakan rakyat di Karesidenan Pekalongan yang dikenal sebagai revolusi sosial. Rakyat melakukan perlawanan dengan tujuan menghapuskan struktur lama seperti kepala desa, pamong desa, camat, wedana, dan pemerintahan kabupaten. Runtuhnya kedudukan pangreh praja di beberapa wilayah di Tiga Daerah akibat revolusi sosial yang berkejolak menyebabkan ketakutan mendalam di kalangan pangreh praja lainnya. Revolusi sosial ini dimulai dengan tuntutan pembagian padi, diikuti oleh aksi dombreg di Desa Cerih, Tegal Selatan, yang dengan cepat meluas ke daerah-daerah lain. Aksi rakyat di Desa Cerih ini menjadi pemicu awal bagi peristiwa di Tiga Daerah (Brebes, Tegal, Pemalang), yang kemudian menyebar ke daerah-daerah lainnya. Aksi ini meluas karena dipengaruhi oleh daerah luar, di mana orang-orang yang ditindas oleh pangreh praja selama pendudukan Jepang pergi ke daerah-daerah yang masih tenang, mengejar pangreh praja dan mendombregnya jika mereka tidak bertindak sesuai dengan keinginan rakyat. (Faidin, 2020: 31)

Jika melihat pola pergolakan yang terjadi, daerah Tegal tampak lebih menonjol dibandingkan Brebes dan Pemalang. Tegal menjadi titik awal aksi perlawanan rakyat yang bertujuan untuk mengadili para

pejabat lokal. Hal ini ditandai dengan aksi massa yang dimulai di desa Cerih. Desa Cerih sendiri terletak di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, yang berbatasan dengan Kabupaten Pemalang. Meskipun belum diketahui secara pasti arah gerakan yang terjadi di Desa Cerih, dapat dikatakan bahwa peristiwa tersebut dipengaruhi oleh aliran komunisme. Hal ini terlihat dari keberadaan beberapa tokoh PKI yang berasal dari Desa Cerih, mantan tahanan Digul pada tahun 1927, yaitu KH. Moeklas dan Haji Iskak Ma'roef. Seperti yang disebutkan dalam unggahan Info Tegal, (2020: Facebook) bahwa KH. Moeklas dan Haji Iskak Ma'roef merupakan tokoh terkemuka di Desa Cerih yang menjadi aktivis buruh dan anggota Sarekat Rakyat.

Menurut H. Mokh. Mukhson dalam catatan pribadinya yang berjudul *Sekelumit tentang Peristiwa Gerakan Tiga Daerah yang meliputi Kabupaten Brebes, Tegal dan Pemalang*, mengatakan bahwa "Kadaan dan suasana di Kabupaten Brebes, Tegal dan Pemalang sesudah kemerdekaan Indonesia semua lapisan masyarakat riang gembira yang meluap-luap, bahkan tak terkendalikan lagi. Rakyat setiap hari berbondong-bondong kesana kemari tanpa tujuan yang tentu-2, sebagai bahtera laju tanpa kemudi atau air bah mengalir tanpa saluran menerjang apa saja yang dilaluinya. Keadaan yang demikian itu diambil kesempatan lagi oleh orang-orang tertentu yang memang menghendaki agar keadaan menjadi kacau dan tidak teratur, istilahnya diselewengkan yakni merdeka diartikan bebas berbuat apa saja yang dikehendaknya, tidak perlu pakai aturan-aturan lagi, kini sampai saatnya rakyat tampil kemuka sebagai hakim (rakyat sebagai hakim), di dalam situasi yang demikian itulah berkecamuk orang saling memfitnah satu sama lain, dan putusan nanti di tangan rakyat".(Mukhson, 1973: 1)

Aksi massa gerakan rakyat yang melibatkan kekerasan dan penggulingan para pangreh praja selama revolusi sosial di Tiga Daerah memang terjadi di tiga kabupaten wilayah Karesidenan Pekalongan, namun tidak terjadi di Kabupaten Pekalongan. Di sana, tidak ada aksi dombreng atau pengarak-arakan terhadap lurah, camat, dan sejenisnya. Secara umum, insiden yang terjadi dengan penyertaan pembunuhan dan lain sebagainya maraknya di Tiga Daerah Karesidenan Pekalongan, yaitu Brebes, Tegal, dan Pemalang.

Pergolakan rakyat pada masa itu sulit untuk diredakan. Kedudukan polisi dan pemerintahan lokal yang lemah membuat mereka merasa bingung dalam menghadapi situasi tersebut. Satu-satunya tindakan yang diambil adalah mengganti para pejabat pemerintah setempat dengan pejabat yang didukung oleh rakyat dan dianggap pro kemerdekaan. Mereka dipilih karena tidak terlibat dalam penyelewengan atau korupsi selama masa penjajahan Belanda dan Jepang. (Lucas, 1989: 155)

Eksistensi Kelompok Komunis dalam Revolusi Sosial Di Karesidenan Pekalongan Tahun 1945

Inisiator Pergolakan Sosial

Menurut Abdurrachman Surjomihardjo dalam karyanya yang berjudul *Peristiwa Tiga Daerah Suatu Interpretasi Sejarah: Revolusi Sosial Menyambut Proklamasi Kemerdekaan*, revolusi menghantam elite birokratik (*pangreh praja*) di kabupaten Brebes, Tegal dan Pemalang, yang semuanya merupakan bagian daerah karesidenan Pekalongan. Selama lima bulan pertama, dari bulan Agustus sampai Desember 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia disambut oleh rakyat setempat dengan pengertian dan persepsinya tentang revolusi sosial sebagai lanjutan Proklamasi Kemerdekaan. Dua bulan pertama setelah proklamasi ditandai oleh peristiwa-peristiwa sambutan rakyat atas pernyataan kemerdekaan itu, sedangkan tiga bulan berikutnya (Oktober, November, dan Desember 1945) interpretasi lokal tentang revolusi Indonesia menonjol dalam bentuk konflik antara rakyat dan *pangreh praja* yang ingin mempertahankan *status quo*. (Surjomihardjo, 1961: 52)

Revolusi sosial yang terjadi di Karesidenan Pekalongan dari Oktober hingga Desember menyebabkan pergolakan rakyat yang sulit dibendung dengan cepat. Di balik peristiwa revolusi tersebut, ada tokoh-tokoh yang benar-benar berperan penting sebagai pemimpin revolusi yang dapat membawa rakyat menuju perubahan yang diinginkan. Peran tokoh-tokoh revolusi yang mampu mengendalikan jalannya revolusi membantu memastikan bahwa revolusi berjalan sesuai rencana. Dalam konteks ini, penulis akan memberikan



gambaran singkat tentang tokoh-tokoh yang terlibat dalam arus pergolakan rakyat pada masa itu.

Lenggaong

Lenggaong adalah sebuah kelompok sosial yang terdiri dari tokoh-tokoh desa, seperti pemuka desa, jawara, dan bandit, yang memiliki kemampuan khusus dalam ilmu batin atau ilmu kanuragan. Arti dari "lenggaong" bervariasi, namun secara umum, mereka dianggap memiliki status khusus di mata masyarakat setempat karena pengetahuan dan kemampuan kanuragan mereka, yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu seperti anggota lenggaong. Peran Lenggaong dalam revolusi sosial yang terjadi di Kabupaten Brebes, Tegal, dan Pemalang sangat jelas. Lenggaong adalah satu-satunya tokoh yang memimpin gerakan dengan melakukan aksi penyerangan dan menangkap pejabat-pejabat lokal. Setelah Jepang mulai kehilangan kekuasaannya di Indonesia, mereka dengan cepat menangkap pejabat lokal seperti lurah, camat, dan bupati untuk diadili.

Kaum Lenggaong di Tiga Daerah tersebut menjadi tokoh utama dalam memimpin revolusi kemerdekaan di wilayah pedesaan pada Oktober 1945. Mereka juga memelopori perlawanan terhadap elite birokrat yang dianggap korup dan mengambil alih pabrik gula yang sebelumnya dikuasai Jepang. Kaum Lenggaong inilah yang menjadi pemicu awal terjadinya revolusi di Tiga Daerah Karesidenan Pekalongan. Hal yang menarik, dan membuat penulis yakin bahwa kaum Lenggaong ini memiliki hubungan dengan kelompok radikal yang sekarang disebut sebagai partai terlarang di Indonesia, yaitu PKI, adalah bahwa salah satu kaum Lenggaong di Comal, Pemalang, merupakan anggota Barisan Cekrong (arit). Kelompok ini memiliki hubungan baik dengan anggota Sarekat Rakyat, bahkan menjadikan salah satu anggota Sarekat Rakyat sebagai penasihat politik mereka. Dengan demikian, jelas bahwa di balik kaum Lenggaong yang memimpin revolusi sosial terdapat aliran kiri yang mendukung mereka.

Kutil

Salah satu tokoh revolusioner terkenal Tiga Daerah adalah Kutil, yang berasal dari Talang, Tegal. Nama aslinya adalah Sakhyani, dan karena wajahnya berbintik-bintik hitam, ia dijuluki Kutil, sesuai dengan ciri khasnya. Di Talang, ia dikenal sebagai guru ngaji yang disegani banyak orang. Dengan latar belakang agamis, ia dihormati dan banyak orang patuh kepadanya. Sosok Kutil sangat misterius. Di balik kekejamannya dalam menumpas antek-antek Kolonial, ia seringkali menentang ketidakadilan. Kutil sangat terkenal karena tindakan dan gerakannya selama revolusi sosial. Ia merupakan pemimpin di Talang dan memimpin sebuah organisasi bernama Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) Talang bersama rekan-rekannya. Talang menjadi contoh yang terkenal selama revolusi sosial di Tiga Daerah, karena banyak korban jatuh akibat aksi kelompok Kutil yang dikenal kejam, buas, dan anarkis. Anggota kelompok Kutil terdiri dari pedagang, penjual makanan, penjahit, petani miskin, tukang besi, dan penjual jamu. (Lucas, 1989: 147)

Pada masa revolusi sosial, kelompok Kutil berusaha mencari sisa-sisa orang Jepang dan melucuti mereka. Mereka juga mengejar agen-agen NICA dan membunuh orang-orang yang pro-Kolonial. Tujuan dari AMRI, yang dibentuk oleh Kutil, adalah pembagian kekayaan dan penumpasan terhadap setiap orang yang dicurigai sebagai agen NICA, yang dianggap sebagai pengkhianat Republik. Peran Kutil sangat mencolok selama masa revolusi sosial, menjadi perantara antara kelompok agama dan kelompok Lengggaong. Ia juga memiliki hubungan dengan para pemimpin badan perjuangan seperti AMRI Slawi, yang ia lakukan untuk memperluas pengaruh dan menjalin kerja sama. Kutil menjadi pelopor pergerakan revolusi di Talang, yang kemudian melebarkan pengaruhnya ke daerah-daerah lain. Apa yang terjadi di Talang menjadi cerminan pergolakan revolusi yang sama halnya terjadi di tempat lain. Asas sama rata sama rasa menunjukkan bahwa Kutil memiliki ide dan faham seperti yang dianut oleh kelompok-kelompok radikal atau PKI. Hal ini terlihat ketika ia ditunjuk sebagai kepala kepolisian kabupaten atas dorongan Badan Pekerja Tegal yang dibentuk oleh K. Mijaya.

K. Mijaya

K. Midjaya adalah salah satu tokoh dalam revolusi sosial di Karesidenan Pekalongan. Meskipun namanya tidak sepopuler Kutil alias Sakhyani, yang merupakan tokoh pergerakan revolusi di Talang, K. Midjaya adalah pelopor dewan rakyat revolusioner yang disebut Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah (GBP3D). K. Midjaya adalah nama samaran, sedangkan nama aslinya adalah Sardjono, seorang tokoh komunis dari Surakarta. (Sujono, 1974: 10)

Peran K. Midjaya selama revolusi sangat besar. Ia membentuk sebuah Badan Pekerja di Tiga Daerah yang menggantikan kedudukan KNI di daerah itu. Bersama rekannya, S. Widarta, ia berhasil membangun kekuatan besar berhaluan kiri dengan tujuan mendirikan pemerintah sosialis. K. Midjaya adalah tokoh yang menjadi buronan selama pendudukan Jepang, memimpin PKI bawah tanah di wilayah pantai utara, dan memiliki hubungan dengan tokoh serikat buruh dan eks-Digulis. Pada awal revolusi sosial, ia berhasil menggalang kekuatan tokoh-tokoh radikal dari berbagai daerah, membangun jaringan, dan menjalin persahabatan dengan aliran radikal lainnya. Tindakan pertama K. Midjaya adalah membentuk satu kekuatan besar di Tiga Daerah. Ia menjalin hubungan baik dan mempersatukan kaum radikal Pemalang dan AMRI Slawi yang dipimpin oleh Suwignyo, seorang veteran PKI 1926, dan Raden Sakirman, seorang priayi Yogyakarta yang juga radikal. Ia memperkenalkan tokoh-tokoh radikal Pemalang seperti Tan Jiem Kwan, Bung Kecil, dan Widarta, yang merupakan utusan Menteri Penerangan, Amir Syarifuddin, untuk memulihkan ketertiban dan menegakkan pemerintah Republik Indonesia sejati berdasarkan prinsip pemerintahan sosialis.

Ruang gerak K. Midjaya dimulai dengan pendirian Badan Pekerja (BP), yang menjadi alat penting dalam strategi front persatuan. Pembentukan BP dimulai di Brebes, kemudian diikuti oleh BP Tegal yang anggotanya dipilih langsung oleh K. Midjaya. Keanggotaan BP di kedua daerah ini melibatkan berbagai kalangan, dengan tujuan untuk menyatukan berbagai kekuatan menjadi satu untuk mempermudah mencapai tujuan dan kepentingannya. Di Pemalang, K. Midjaya tidak mendirikan BP karena salah satu tokoh perjuangan Pemalang, Supangat, sudah menjalin hubungan dengannya. Setelah membentuk BP, langkah berikutnya yang diambil oleh K. Midjaya adalah

menggabungkan seluruh kekuatan tersebut ke dalam sebuah organisasi berhaluan kiri yang disebut Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah (GBP3D). Tujuan organisasi ini adalah mengambil alih pemerintahan ibu kota Karesidenan dengan mengganti Residen Pekalongan dengan seseorang dari golongannya.

Sujono menuangkan gagasannya tentang K. Mijaya yang berusaha merebut kekuasaan pemerintahan Karesideenan Pekalongan tertulis dalam catatan pribadinya, "Tjita-Tjitanya agar sdr.Residen ini menjingkir atau disingkirkan telah tertjapai dan mereka mungkin berpendapat, bahwa djalan untuk merebut daerah kabupaten Pekalongan dengan demikian menjadi lebih dipermudah. Sebagaimana diuraikan dimuka, maka setelah wilajah kabupaten Brebes berhasil dikuasai dan direbut, gerak tjepat untuk melangkah merebut wilajah kabupaten Pekalongan untuk sementara tidak dilakukan. Mereka mengetahui, bahwa di ibukota kabupaten Pekalongan jang bersih dari anasir-anasir kiri: dengan kekuatan militer TKR jang tanggung dan angkatan mudanja jang ganas berani bertempur dengan kempeitai Jepang; disamping itu kekuatan tempur jang tidak boleh diremehkan dari barisan Hisbullah dibawah pimpinan Hasan Ismail, jang tegas anti-komunis; tetapi diatas itu semuanya adalah bersihnja wilajah kabupaten Pekalongan dari unsur-unsur komunis atau ultra kiri, jang mungkin dapat digunakan sebagai pangkalan untuk melanjutkan gerakannya menjerbu kewilayah kabupaten itu. Faktor inilah jang menghentikan gerak tjepat mereka untuk melangkah dan merebut wilajah kabupaten Pekalongan dan memaksa mereka mentjari jalan atau siasat lain".(Sujono, 1974: 11)

Dari keterangan di atas, maka jelas bahwa K. Midjaya menjadi otak dari semua tokoh revolusi sosial di Tiga Daerah melalui upaya-upayanya dengan menjalin dan menggalang kekuatan badan perjuangan di tiga kabupaten sekaligus untuk menyerbu ibukota Karesidenan Pekalongan. K. Midjaya menjadi salah satu inisiator pergerakan yang berupaya mendirikan pemerintahan berhaluan sosialis lewat usaha propaganda dan konsolidasinya sehingga arus revolusi dapat berjalan sesuai yang direncanakan oleh kelompok-kelompok radikal atau komunis.

Propaganda Perjuangan Kelompok Komunis

Dalam menguraikan mengenai propaganda perjuangan kelompok komunis, penulis mengaitkan hubungan antara insiden yang terjadi di Karesidenan Pekalongan dengan pemberontakan PKI pada tahun 1926-1927, di mana terlihat kemiripan yang signifikan. Pemberontakan PKI 1926 adalah salah satu pemberontakan terbesar yang melibatkan berbagai kelompok, termasuk aliran Islam, bangsawan, petani, buruh, dan masyarakat kelas bawah lainnya yang melawan Pemerintah Kolonial Belanda. Namun, pemberontakan ini berakhir dengan tragis lantaran para tokohnya berhasil ditumpas satu per satu dan dijatuhi hukuman berat oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Salah satu contohnya adalah di Banten, di mana sekitar 1.300 orang ditahan, sebagian diadili dengan hukuman berat atau mati, dan 99.000 orang diasingkan ke kamp tahanan Digul di Papua Barat. (Suharto, 2001: 65-71). Hal serupa juga terjadi di Karesidenan Pekalongan, di mana para tokoh revolusi dari berbagai latar belakang bersatu melakukan gerakan yang dinamakan gerakan revolusi rakyat untuk menuntut perubahan di Karesidenan Pekalongan. Mereka berhasil menggulingkan seluruh pangreh praja di daerah Kabupaten Brebes, Tegal, dan Pemalang, dan menggantinya sesuai dengan kehendak rakyat.

Sebagaimana terlihat, peristiwa pergolakan dan aksi pendaulatan pangreh praja umumnya dilakukan oleh rakyat dengan latar belakang sebagai petani dan buruh yang memiliki masa lalu yang penuh penderitaan. Selain itu, upaya para pelopor pemerintahan sosialis banyak melibatkan diri bersama rakyat kelas bawah, khususnya petani dan buruh, untuk menggalang kekuatan besar dalam mendirikan pemerintahan sosialis. Mereka menyebarkan selebaran pamflet perjuangan dan tulisan-tulisan mengenai kedaulatan rakyat, dengan menyatakan bahwa satu-satunya pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan sosialis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya media cetak yang menerbitkan tulisan-tulisan tersebut di berbagai surat kabar dan koran.

S. Tasrif dalam tulisannya yang dimuat di Surat Kabar Berita Indonesia Soeara Perdjoeangan mengatakan bahwa kondisi ekonomi kaum buruh dan tani tidak akan mengalami perubahan selama pemerintahan masih dipengaruhi oleh kaum kapitalis. Kaum buruh dan

tani hanya akan dijadikan budak oleh para kapitalis, khususnya di Indonesia. Selain itu, upah buruh dan tani di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti di Eropa. Kaum buruh dan tani hanya akan digunakan sebagai alat untuk kepentingan industri para kapitalis. Maka seluruh kaum buruh dan tani harus segera bertindak untuk menghancurkan dan menyingkirkan pemerintahan yang masih memiliki ciri-ciri kapitalis dan menggantinya dengan pemerintahan sosialis. (Tasrif, Surat Kabar Berita Indonesia: Soeara Perdjoengan 9 November 1945)

Konsolidasi Organisasi Sayap Kiri

Setelah K. Midjaya berhasil menjalin hubungan dengan para pejuang di Tiga Daerah, ia mulai melakukan konsolidasi. Sebuah Dewan Rakyat (revolusioner) dan badan pekerja segera dibentuk sebagai pusat kepemimpinan dan motor dari segala aktivitas. Badan Pekerja ini menjadi tombak dalam merombak pemerintahan di Tiga Daerah. Dalam hal ini, K. Midjaya tidak menjalankan misinya sendirian. Bersama dengan rekan-rekan sesama tokoh radikal dan bekas tahanan Digul, ia membangun kekuatan bersama badan-badan perjuangan di Tiga Daerah. Mereka menyusun kekuatan pertahanan yang terdiri dari AMRI, API, Barisan Pelopor, dan lainnya yang menjadi alat dari gerakan Tiga Daerah. (Sujono, 1974: 9)

Setelah kekuatan itu terkumpul, ia mendirikan sebuah organisasi berhaluan kiri yang disebut Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah (GBP3D). Setelah GBP3D dibentuk, K. Midjaya segera memulai aksinya dengan mengajukan tuntutan kepada pemerintah karesidenan Pekalongan pada tanggal 6 Desember. Keesokan harinya, diadakan sidang antara GBP3D dan wakil residen. Dalam sidang ini disepakati bahwa residen baru, yang diusulkan oleh GBP3D, akan diangkat, yaitu Sardjio, dan peralihan pemerintahan akan segera dilaksanakan. (Lucas, 1989: 249)

Pada tanggal 11 Desember 1945, Sardjio beserta Staf Karesidenannya tiba dengan dikawal oleh satu kompi pasukan bersenjata. Sardjio, yang dipilih oleh GBP3D, segera menduduki kantor dan rumah Karesidenan, lalu mulai menjalankan tugasnya sebagai Residen Pekalongan yang baru. Setelah terjadi pelimpahan

kekuasaan, GBP3D mengundang seluruh pejabat lama karesidenan ke markas mereka di Hotel Merdeka untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan GBP3D, yaitu membentuk pemerintahan karesidenan yang lebih demokratis sesuai dengan kedaulatan rakyat. KOMPI pengawal Tiga Daerah menguasai seluruh saluran telepon, listrik, kantor pos, administrasi penjara, dan polisi di karesidenan. Kendaraan yang masuk dan keluar Pekalongan juga diperiksa. Residen sebelumnya, Suprpto, menyerahkan seluruh isi kantor karesidenan kepada Sarjio, termasuk dokumen dan arsip penting, tanpa terkecuali.

Setelah peralihan pemerintahan dan pemeriksaan administrasi selesai, K. Midjaya mengambil langkah selanjutnya dengan membentuk Dewan Pekerja di Pekalongan, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, serupa dengan struktur di Tiga Daerah. K. Midjaya juga menyarankan agar para pemimpin Batang membentuk Badan Pekerja untuk memastikan koordinasi yang baik. Sardjio, untuk menunjukkan pemerintahan yang revolusioner, mengumumkan kepada seluruh rakyat karesidenan Pekalongan bahwa Pemerintah Daerah Pekalongan telah jatuh ke tangan rakyat dan semua sebutan serta gelar kepriyayi harus diganti. Pemerintah baru berprinsip demokrasi dan kekeluargaan, di mana semua hubungan antara pejabat dan rakyat harus berdasarkan prinsip tersebut.

Jatuhnya Pemerintah Karesidenan Pekalongan menandakan keberhasilan konsolidasi yang dilakukan oleh Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah (GBP3D). K. Midjaya dan rekan-rekannya berhasil mengukuhkan kekuatan baru di pusat ibukota Karesidenan Pekalongan, sehingga tujuan awal mereka semakin dekat. Langkah kolaborasi kelompok Komunis dengan badan perjuangan di Tiga Daerah untuk menguasai pemerintah Karesidenan kini telah tercapai secara resmi. Mereka segera membentuk badan pekerja yang terstruktur di Pekalongan, mirip dengan yang dilakukan di Tiga Daerah, serta melakukan penyegelan uang untuk sementara dan memeriksa administrasi di setiap kantor daerah Karesidenan Pekalongan. Tindakan ini diambil untuk kepentingan politik Tiga Daerah agar eksistensi pemerintah baru diakui di seluruh wilayah dan mendukung pencapaian tujuan pemerintah tersebut. (Aman, 2015: 102)

Setelah berhasil mengambil alih pemerintah Karesidenan Pekalongan, GBP3D kemudian melaksanakan rapat besar di alun-alun Pekalongan yang dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat Pekalongan. Dalam pidatonya, pimpinan GBP3D, K. Mijaya menyindir para pemuda Islam yang kurang revolusioner, sehingga hal ini memicu konflik antara GBP3D dengan para pemuda Islam.

Pada 14 Desember 1945, para pemuda Islam melancarkan aksi penyerangan terhadap staf pemerintah GBP3D saat sedang melakukan perjalanan dinas ke beberapa daerah Pekalongan bagian selatan untuk menyusun pemerintahan baru di wilayah-wilayah tersebut. Akibat insiden yang terjadi, kemudian TKR segera memosisikan diri untuk menangani kasus tersebut. TKR mengklaim bahwa GBP3D merupakan sumber kekacauan yang ada, yang mana prinsip dan dasar pemerintahannya sudah melenceng dari ideologi dasar negara Indonesia. Sehingga TKR dan para pemuda Islam kemudian bekerja sama dan melakukan pengepungan serta penangkapan tokoh-tokoh GBP3D di Hotel Merdeka Pekalongan yang menjadi markas GBP3D. Sebanyak 170 orang dari Tiga Daerah di Pekalongan berhasil ditangkap dan dimasukkan ke penjara, termasuk seluruh anggota staf pemerintahan serta anggota GBP3D di Pekalongan. (Lucas, 1989: 252)

Setelah peristiwa penangkapan oleh TKR yang bekerja sama dengan pemuda Islam Pekalongan, GBP3D berada dalam posisi terjepit. Mereka mengadakan rapat darurat di Pemalang untuk mencoba membebaskan Sardjio dan stafnya, namun pimpinan TKR menolak permintaan tersebut secara tegas. Pada 17 Desember 1945, TKR bersama pemuda Islam melancarkan operasi gabungan bergerak menuju Brebes, Tegal, dan Pemalang untuk terus menangkap tokoh-tokoh revolusioner. Mereka berhasil menangkap satu per satu dan membawanya ke Pekalongan untuk dipenjarakan bersama para pemimpin revolusioner lainnya. Dengan operasi gabungan ini, berakhir pula pergolakan revolusioner Tiga Daerah atau revolusi sosial di Karesidenan Pekalongan yang berlangsung sekitar empat bulan lamanya.

KESIMPULAN

Revolusi sosial di Karesidenan Pekalongan dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, penderitaan dan penindasan rakyat selama masa penjajahan Belanda dan Jepang, di mana kebijakan politik yang diterapkan hanya menguntungkan pihak pemerintah kolonial. Hal ini membuat rakyat semakin menderita, miskin, dan mengalami kesulitan hidup yang berkepanjangan. Kedua, adanya penyimpangan dan korupsi yang dilakukan oleh pangreh praja (Bupati, Wedana, Camat, dan Lurah atau Kepala Desa). Mereka seringkali menaikkan pajak yang harus dibayar rakyat dan memungut padi secara paksa. Jika rakyat tidak mampu membayar setoran padi, lahan mereka akan diambil. Ketiga, penentangan pangreh praja terhadap berita proklamasi kemerdekaan. Mereka menolak mengakui kemerdekaan Indonesia dan belum ada informasi yang jelas terakut berita proklamasi kemerdekaan.

Peristiwa Revolusi Sosial ini berlangsung pada bulan Agustus hingga September sebagai gejala awal dan puncaknya pada bulan Oktober hingga Desember tahun 1945. Peristiwa revolusi ini melibatkan konflik dan kekerasan, serta penggulingan paksa terhadap pangreh praja (Bupati, Wedana, Camat, dan Kepala Desa). Peristiwa ini dimulai di Desa Cerih, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, dan kemudian menyebar ke seluruh wilayah Karesidenan Pekalongan, termasuk Kabupaten Tegal, Brebes, dan Pemasang. Mereka melakukan penggulingan terhadap pangreh praja dan menggantinya dengan orang-orang dari kelompok mereka atau seseorang yang disukai oleh rakyat. Kelompok radikal juga mengatur pergantian pejabat lama dengan pejabat baru yang berhaluan sosialis, agamis (Islam), dan komunis.

Pengaruh kelompok radikal atau komunis sangat menonjol dalam revolusi sosial di Karesidenan Pekalongan. Mereka menjadi penggerak utama aksi-aksi pergolakan di berbagai daerah, menentukan arah revolusi sosial di wilayah tersebut. Dalam melaksanakan misi perjuangannya, kelompok komunis menunjukkan kepedulian terhadap penderitaan rakyat kelas bawah seperti petani dan buruh, serta mendorong mereka untuk berjuang bersama. Mereka beralasan bahwa rakyat memerlukan pemerintahan yang demokratis dan sejalan dengan ide-ide sosialis. GBP3D dibentuk setelah Brebes, Tegal, dan Pemasang

berhasil dikuasai, dengan tujuan memperjuangkan front persatuan di Karesidenan Pekalongan dan mengambil alih pemerintahan agar sejalan dengan arah pemerintahan Tiga Daerah. Jika hal itu berhasil, maka langkah berikutnya ialah mewujudkan front persatuan di seluruh wilayah Indonesia.

REFERENCES

- Aman. 2015. *Revolusi Sosial di Brebes*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Alwijaya, Ahmad. 2023. *TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dan Resimen XVII Dalam Penyelesaian Gerakan Rakyat di Karesidenan Pekalongan Tahun 1945*. Skripsi. Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Daryono, Yono dkk. 2008. *Tegal Stad: Evolusi Sebuah Kota*. Tegal: Kantor Informasi dan Humas Kota Tegal.
- Faidin. 2020. "Analisis Tinjauan Historiografi Dalam Buku Peristiwa Tiga Daerah". *Jurnal PIPA: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam*, 1(2): 31.
- Heryati. 2017. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/16087/>
- Info Tegal. 2020. "Tak banyak yang tahu bahwa tahun 1927 ada 16 orang Tegal diasingkan ke Boven Digoel, Papua". Facebook. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=3656963921037198&set=a.138760689524223>
- Kartodirdjo, Sartono. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. 1955. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Pustaka.
- Lucas, Anton E. Pengantar Sartono Kartodirdjoo. 1989. *Peristiwa Tiga Daerah; Revolusi Dalam Revolusi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Mokh. Mukhsan. 1973. "Sekelumit tentang Peristiwa Gerakan Tiga Daerah, Naskah Pribadi".
- Muhammad Nuh. "Arsip Catatan Tertulis Jawaban Semdam tahun 1959".



- Samsudin, Mayjen. 2004. *Mengapa G30S/PKI Gagal?: (Suatu Analisis)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soedjono. 1974. "Gerakan Tiga Daerah, Naskah Pribadi".
- Suryomihardjo, Abdurrahman. 1961. *Peristiwa Tiga Daerah Suatu Interpretasi Sejarah: Revolusi Sosial Menyambut Proklamasi Kemerdekaan. Prisma Edisi No. 8*, Jakarta: LP3ES.
- Tasrif. "Surat Kabar Berita Indonesia: Soeara Perdjoeangan Terbitan 9 November 1945".
- Wiyono dkk. 1991. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Jawa Tengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.